
Perspektif Whole Government (Wog) Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan**Dian Anggraini¹, Lisa Mandasari²**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya

diananggraini@fisip.unsri.ac.id**ABSTRAK**

Isu kemiskinan tetap menjadi isu penting bagi negara-negara berkembang, demikian pula dengan Indonesia. Penanganan persoalan kemiskinan harus dimengerti dan dipahami sebagai persoalan yang harus ditangani secara global. Sehingga setiap program penanganan kemiskinan harus dipahami secara menyeluruh dan saling interdependen dengan beberapa program kegiatan lainnya. Kebijakan penganggulangan kemiskinan yang ada di Indonesia bersifat menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak yang dikenal dengan istilah Whole Government (Wog). Penelitian ini menelaah berdasarkan literature review mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang melibatkan Pemerintah dalam cakupan Wog di Indonesia.

Kata Kunci: Whole Government (Wog), Kebijakan, Kemiskinan**PENDAHULUAN**

Isu kemiskinan tetap menjadi isu penting bagi negara-negara berkembang, demikian pula dengan Indonesia. Penanganan persoalan kemiskinan harus dimengerti dan dipahami sebagai persoalan dunia, sehingga harus ditangani dalam konteks global pula. Sehingga setiap program penanganan kemiskinan harus dipahami secara menyeluruh dan saling interdependen dengan beberapa program kegiatan lainnya. Dalam SDGs dinyatakan *no poverty* (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak

terkecuali Indonesia. Pengentasan kemiskinan akan sangat terkait dengan tujuan global lainnya, yaitu lainnya, dunia tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energy bersih dan terjangkau dan seterusnya hingga pentingnya kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak

dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Kemiskinan terjadi karena ketidakberdayaan masyarakat untuk keluar dari permasalahan kemiskinan yang dihadapinya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah sangat penting dikemukakan sebagai bagian terpenting dari berbagai strategi kebijakan yang dilaksanakan oleh daerah. Melalui strategi yang terencana dengan baik, pemberdayaan masyarakat dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan formal organisasi dan bersifat sporadis seolah-olah mempunyai tujuan.

Menurut BPS, Posisi angka kemiskinan ekstrem per Maret 2022 adalah 2,04% dan menurun di September 2023 menjadi 1,74%. Hal ini sebagai hasil dari penguatan keterpaduan dalam implementasi upaya percepatan kemiskinan yang memiliki tiga prasyarat utama dalam mencapai target penurunan kemiskinan. Adapun syarat utama tersebut antara lain peningkatan kualitas pelaksanaan program, mengembangkan dan memutakhirkan basis

data untuk pensasaran program, serta konvergensi program antar program daerah maupun non-pemerintah. Realisasinya teranulir dalam berbagai kebijakan dan program pemerintah yang selama ini telah dilaksanakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Hal inilah yang disebut dengan Whole Government (WoG).

WoG dalam menanggulangi kemiskinan menekankan pada aspek kebersamaan, juga menghilangkan sekat antarsektoral yang terbangun dalam New Public Management (NPM). Karena fokus utamanya adalah penghilangan sekat antarsektor, pendekatan WoG bisa diaplikasikan pada berbagai bidang antara lain kebijakan public. Salah satu kebijakan penanggulangan kemiskinan yang menerapkan WoG adalah Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial dengan nomenklatur SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation). Sistem ini terintegrasi secara online yang didukung penuh Kementerian Sosial serta Pemerintahan Daerah secara berjenjang dari

tingkat pedesaan/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kotamadya, gubernur. Selanjutnya, data kemiskinan yang telah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai data terpadu yang dapat dipergunakan oleh kementerian/lembaga terkait untuk penanganan kemiskinan yang terdapat dalam form Basis Data Terpadu, sehingga informasi yang dibutuhkan tentang masyarakat miskin akan semakin lengkap.

Namun indikasi dalam pelaksanaannya ditemui antara lain penguasaan teknologi dalam tata kerja oleh operator di tingkat Desa atau Kecamatan yang mempengaruhi kinerja, serta kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam update data. Kemampuan SDM dalam pemutakhiran data masyarakat Masyarakat miskin merupakan langkah penting dalam pembaharuan data yang berkualitas. Kegiatan pemutakhiran data dilakukan melalui verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh Kementerian Sosial untuk selanjutnya diteruskan Dinas Sosial kabupaten/kota secara berkala dengan melibatkan Pemerintah Daerah seperti Kelurahan setempat sebagai fasilitator pendataan terpadu dalam menentukan penerima Program Penanggulangan Kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan program

pemerintah lainnya. Program penanggulangan kemiskinan tidak terintegrasi. Selama ini, penerima manfaat dihadapkan pada akses program penanggulangan kemiskinan yang panjang dan tentunya membutuhkan biaya transportasi yang tidak sedikit. Terakhir, adanya kendala di tingkat penerima manfaat program yaitu perbedaan data dan rendahnya tingkat validitas basis data. Berdasarkan latar belakang tersebut, Peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian berjudul Perspektif Whole Government (WoG) Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam Penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Perspektif Whole Government (WoG) Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan ?
2. Bagaimana model kebijakan yang tepat berdasarkan perspektif WoG dalam menanggulangi kemiskinan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk menganalisa bagaimana Perspektif Whole Government (WoG)

Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.

2. Untuk menemukan model kebijakan yang tepat berdasarkan perspektif WoG dalam menanggulangi kemiskinan.

KAJIAN PUSTAKA

Definisi Whole (WoG) Government

Definisi WoG yang dinyatakan United States Institute of Peace (USIP) menjelaskannya sebagai berikut :

“An approach that integrates the collaborative efforts achieve unity of effort toward a shared goal. Also known as interagency approach. The terms unity of effort and unity of purpose are sometimes used to describe cooperation among all actors, government and otherwise” (“Whole-of-government approach Glossary of Terms for Conflict Management and Peacebuilding,” n.d.).

Dalam pengertian USIP, WoG ditekankan pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan bersama. WoG juga dipandang sebagai bentuk kerjasama antar seluruh aktor, pemerintah dan sebaliknya. Pengertian dari USIP ini menunjukkan bahwa WoG tidak hanya merupakan pendekatan yang mencoba mengurangi sekat-sekat sektor, tetapi juga penekanan pada kerjasama guna mencapai tujuan-tujuan bersama. Dalam banyak literatur lainnya, WoG juga sering

disamakan atau minimal disandingkan dengan konsep policy integration atau policy coherence. WoG memiliki kemiripan karakteristik dengan konsep tersebut, terutama karakteristik integrasi institusi atau penyatuan pelembagaan baik secara formal maupun informal dalam satu wadah. Ciri lainnya adalah kolaborasi yang terjadi antar sektor dalam menangani isu tertentu. Namun demikian terdapat pula perbedaannya, dan yang paling nampak adalah bahwa WoG menekankan adanya penyatuan keseluruhan (whole) elemen pemerintahan, sementara konsep-konsep tadi lebih banyak menekankan pada pencapaian tujuan, proses integrasi institusi, proses kebijakan dan lainnya, sehingga penyatuan yang terjadi hanya berlaku pada sektor tertentu saja yang dipandang relevan.

Perspektif WoG

Dalam memanfaatkan pendekatan WoG ini, terdapat beberapa prasyarat agar pendekatan ini dapat diterapkan. APSC (Shergold & others, 2004) merumuskan prasyarat untuk penerapan WoG yang baik yaitu :

1. Budaya dan Filosofi

Mengabungkan dan adaptasi nilai-nilai WoG ke dalam budaya yang dianut

sebelumnya merupakan keharusan agar tidak terjadi *culture shock* dalam dinamika organisasi. Berbagi informasi serta manajemen pengetahuan kerjasama juga menjadi prasyarat dalam penerapan WoG, dan tentunya kerjasama dan hubungan yang efektif top-down dan bottom up dalam membentuk filosofi organisasi atau koordinasi yang baik.

2. Cara Kerja yang Baru

Hal ini terkait bagaimana penyelenggaraan kepemimpinan yang berbagi antara satu sektor dengan sektor lainnya. WoG juga mensyaratkan adanya keahlian atau expertise yang melekat pada SDM yang terlibat di dalamnya. Proses yang dilakukan oleh tim WoG juga seyogyanya fleksibel atau tidak kaku, mengikuti perubahan yang mungkin terjadi, serta adanya sumber daya yang kooperatif.

3. Akuntabilitas dan Insentif

Outcome dan pelaporan yang dibagi antar sektor, fleksibilitas serta bagaimana reward dan pengakuan menjadi bagian dari manajemen horizontal.

4. Cara baru Pengembangan Kebijakan, Mendesain Program dan Pelayanan

Collegiate approach, yaitu melalui pendekatan kolegial di mana masing-masing sektor mempunyai kesetaraan

dalam pengambilan keputusan/kebijakan. Selain itu juga fokus pada outcome dari proses WoG ini, serta melaksanakan proses-proses konsultasi dan pelibatan warga masyarakat di dalamnya.

Kebijakan Publik

Kebijakan atau policy (Budi Winarno dalam James Anderson, 1979 : 4), dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan kebijakan kemudian inilah menjadi ciri khusus dari kebijakan publik dalam suatu sistem politik. Namun demikian, satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu, dan mencakup pula arah atau apa yang dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan, hal ini dilakukan karena kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi (Budi Winarno, 2002 : 16). Sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep ini di rinci menjadi

beberapa kategori, seperti tuntutan-tuntutan kebijakan (policy demands), keputusan-keputusan kebijakan (policy decisions), pernyataan pernyataan kebijakan (policy statements), hasil-hasil kebijakan (policy outputs) dan dampak-dampak kebijakan (outcomes). Sehingga kebijakan yang diambil sangat menentukan permasalahan keberhasilan dari program yang akan dilakukan untuk pengentasan kemiskinan bagi masyarakat apakah program tersebut sesuai atau tidak bagi publik.

Berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya

manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan tersebut bahwa sumber-sumber yang penting meliputi staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang

diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan public. Gonsalves dalam Iqbal (2005, p. 90) mendeskripsikan aktor implementasi atas siapa yang memberi dampak dan/atau siapa yang terkena dampak kebijakan, program, dan aktivitas pembangunan. Mereka bisa laki-laki atau perempuan, komunitas, kelompok sosial ekonomi, atau lembaga dalam berbagai dimensi pada setiap tingkat golongan masyarakat. Pada umumnya peran aktor dalam implementasi dibagi menjadi tiga yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Kemiskinan

Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Badan Pusat Statistik mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (proverty line) atau disebut juga batas kemiskinan (poverty treshold).

Menurut (Yacoub, 2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling

mendasar dalam kehidupan dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara. Menurut (World Bank, 2004) salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (lack of income and assets) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (acceptable). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (the poor) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.

Kebijakan pemerintah terkait strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia ditandai oleh upaya pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang kemudian merumuskan program-program pengentasan kemiskinan. Namun dalam kenyataannya, program yang dijalankan oleh pemerintah belum mampu menyentuh pokok yang menimbulkan masalah kemiskinan ini. Ada beberapa program pemerintah yang sudah dijalankan dan dimaksudkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Seperti di antaranya adalah program Bantuan Langsung Tunai seperti Program Keluarga

Harapan (PKH) Selain itu ada juga pelaksanaan bantuan di bidang kesehatan yaitu jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas.

METODE PENELITIAN

Pembahasan penulisan ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu melakukan analisis dari sejumlah literatur dan sejumlah sumber data baik primer, sekunder dan lainnya. Teori yang terkait dengan pendekatan WoG dihubungkan dan dibandingkan secara teoritis dari literatur maupun sumber

PEMBAHASAN

Pendekatan WoG dapat beroperasi dalam tataran kelembagaan nasional maupun daerah. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan berdasarkan Analisa WoG yaitu didasarkan penataan kelembagaan penanganan kemiskinan menjadi sebuah keharusan ketika pendekatan ini diperkenalkan. Namun penataan ini tidak serta merta merubah kelembagaan, atau sebaliknya. Sehingga pendekatan WoG dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan perbedaan kategori hubungan antara kelembagaan yang terlibat.

WoG dapat dipraktekkan dalam kontinum koordinasi-merger, di mana pelaksanaan

WoG dilakukan mulai dari sebatas koordinasi tanpa ada dampak perubahan institusi atau kelembagaan sampai dengan proses merger atau penyatuan beberapa lembaga menjadi satu unit organisasi baru. Perbedaan masing-masing kategori terletak dari posisi masing-masing kelembagaan yang terlibat atau dilibatkan dalam WoG. Untuk kategori koordinasi, maka kelembagaan yang terlibat dalam pendekatan WoG tidak mengalami perubahan struktur organisasi. Sedangkan dalam kategori integrasi, kelembagaan yang terlibat mulai cair, dan terdapat penyamaan perencanaan jangka panjang serta kerjasama. Adapun dalam kategori kedekatan dan pelibatan, kelembagaan menyatukan diri dalam wadah yang relatif lebih permanen. Dalam penerapan WoG ini, terdapat beberapa prasyarat agar pendekatan ini dapat diterapkan. APSC (Shergold & others, 2004) merumuskan prasyarat untuk penerapan WoG yang baik yaitu antara lain:

1. Budaya dan Filosofi Mengabungkan dan adaptasi nilai-nilai WoG ke dalam budaya yang dianut sebelumnya merupakan keharusan agar tidak terjadi “culture shock” dalam dinamika organisasi. Berbagi informasi serta manajemen penanganan Kemiskinan “No Poverty” sebagai No. 1 dalam Sdgs juga menjadi prasyarat dalam penerapan WoG, dan tentunya kerjasama dan hubungan yang efektif top-down dan

bottom up dalam membentuk filosofi organisasi atau koordinasi yang baik. Hal ini dapat dilihat dalam penetapan

2. Cara Kerja yang Baru Hal ini terkait bagaimana penyelenggaraan kepemimpinan yang berbagi antara satu sektor dengan sektor lainnya. WoG juga mensyaratkan adanya keahlian atau expertise yang melekat pada SDM yang terlibat di dalamnya. Proses yang dilakukan oleh tim WoG juga seyogyanya fleksibel atau tidak kaku, mengikuti perubahan yang mungkin terjadi, serta adanya sumber daya yang kooperatif

3. Akuntabilitas dan Insentif Outcome dan pelaporan yang dibagi antar sektor, fleksibilitas serta bagaimana reward dan pengakuan menjadi bagian dari manajemen horizontal.

4. Cara baru Pengembangan Kebijakan, Mendesain Program dan Pelayanan Collegiate approach, yaitu melalui pendekatan kolegial di mana masing-masing sektor mempunyai kesetaraan dalam pengambilan keputusan/kebijakan. Selain itu juga fokus pada outcome dari proses WoG ini, serta melaksanakan proses-proses konsultasi dan pelibatan warga masyarakat di dalamnya. Di Indonesia dikenal beberapa jenis lembaga yang dibentuk guna mengkoordinasikan sektor atau kementerian dan lembaga. Dalam struktur kabinet, lembaga setingkat menteri dibentuk

Kementerian Koordinator, yang bertugas mengkoordinasi Kementerian-kementerian dan lembaga yang relevan dengan bidangnya. Beberapa sektor juga dibentuk forum atau lembaga interdepartemen yang bertugas mengkoordinasikan program atau kegiatan tertentu yang beririsan dari beberapa sektor. Beberapa bentuk gugus tugas juga dibentuk untuk menangani isu-isu tertentu. Di tingkat masyarakat, forum-forum komunikasi warga dan kemitraan dengan pemerintah daerah juga dibangun untuk membahas perencanaan pembangunan dan bagaimana masyarakat dapat memahami isu-isu pembangunan. Terdapat beberapa cara pendekatan WoG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal.

Seperti yang dikemukakan oleh Nazara menjelaskan tahapan-tahapan dalam merumuskan kebijakan sebagai berikut :

1. Tahap Pertama: melakukan diagnosis dan analisis tentang kemiskinan. Pada tahap ini dilakukan kegiatan melakukan pengukuran tingkat kemiskinan, penargetan dan penentuan jenis kebijakan atau program yang ingin dibuat.

2. Tahap Kedua : menentukan tujuan, target dan indikator yang ingin dicapai. Seperti yang dikemukakan, lebih lanjut oleh Nazara ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan target, yaitu pertama;

tujuan yang ingin dicapai harus menyesuaikan dengan standar internasional, yaitu harus sesuai dengan tujuan MDGs. Kedua, dalam masyarakat dalam melaksanakan program, dan pemerintah berperan sebagai fasilitator. menentukan tujuan perlu memerhatikan distribusi pendapatan. Ketiga, tujuan ditentukan melalui proses partisipasi semua pihak. Keempat, tujuan ditentukan dengan menentukan ukuran pencapaian atau benchmark berdasarkan waktu yang tersedia. Kelima, dalam menentukan tujuan agar lebih tepat sasaran harus berdasarkan pada beberapa ukuran kemiskinan berbeda. Keenam, tujuan harus dibuat secara spesifik dengan program agar proses monitoring menjadi lebih mudah.

3. Tahap ketiga, yaitu merancang dan mengimplementasikan program. Hasil dari tahap ini, yaitu berupa peraturan, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis. Pada saat akan mengimplementasikan program harus dimulai dengan kegiatan sosialisasi program pada tahap awal, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan monitoring selama program berlangsung, dan diakhiri dengan kegiatan evaluasi ketika program berakhir. Monitoring dilakukan untuk menyediakan informasi apakah kebijakan program diimplementasikan sesuai dengan rencana dalam upaya mencapai tujuan. Monitoring ini merupakan alat manajemen yang efektif,

pada kegiatan ini jika implementasi program tidak sesuai dengan rencana maka dapat mengidentifikasi letak masalahnya kemudian dicari penyelesaiannya. Sedangkan evaluasi berfungsi untuk melihat dampak dengan mengisolasi efek suatu intervensi. Kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan tentunya dalam implementasi melalui program-program yang berbasis pada penggalian potensi yang ada di masyarakat itu sendiri. Artinya perlu melibatkan peran serta Lebih lanjut sebagaimana yang telah diuraikan di muka, Dunn menjelaskan secara rinci terkait tahap-tahap kebijakan publik sebagai berikut :

1. Penyusunan Agenda (Agenda Setting);
2. Formulasi Kebijakan (Policy Formulating);
3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan (Policy Adoption);
4. Implementasi Kebijakan (Policy Implementation);
5. Penilaian/Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation).

Dalam kaitannya merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia, maka perlu dilakukan kajian akademik secara komprehensif dan memerhatikan tahap-tahap kebijakan publik yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi kemiskinan di Indonesia. Selain itu perlu juga dirumuskan strategi untuk keberlangsungan program (kegiatan) di masyarakat yang didukung dengan adanya koordinasi antara instansi terkait. Berbagai program telah banyak

dilakukan, namun terkesan hanya dapat mengatasi masalah sesaat dan tidak mengatasi akar masalahnya, sehingga relatif lambat dalam upaya mengatasi kemiskinan. Selain memerhatikan tahap-tahap komprehensif yang terdapat di dalam proses kebijakan publik, pemerintah perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut: 1. Pengadaan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Clean Governance; Berdasarkan analisis penulis, tanpa good dan clean governance, maka untuk mengentaskan kemiskinan yang memiliki dana terbatas jumlahnya tidak akan dapat digunakan secara baik. Hal ini dikarenakan masih terjadi kurangnya transparansi pemerintahan; terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang mementingkan kepentingan-kepentingan pihak tertentu pendekatan kelompok, dalam bentuk usaha ekonomi bersama dianggap dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat; serta tidak jelasnya system peradilan yang mengakibatkan terhabatnya pertumbuhan ekonomi yang dapat membantu masyarakat miskin keluar dari kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan merupakan program yang berkelanjutan (sustainable), terusmenerus dan mengedepankan kemandirian masyarakat. Takdapat dipungkiri bahwa pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara bertahap, berkesinambungan serta berintegrasi dan

didasarkan pada pola kemandirian masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat miskin dapat membantu diri sendiri. Dengan kata lain, program kemiskinan yang diberikan berkesesuaian dengan peningkatan kemampuan masyarakat miskin untuk melakukan kegiatan produktif sehingga dapat menghasilkan nilai tambah (pendapatan) yang lebih besar untuk keluar dari garis kemiskinan.

KESIMPULAN

Dalam upaya percepatan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia, maka perlu dilakukan perbaikan di dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Hal ini utamanya terkait Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di seluruh tingkat di berbagai level Pemerintahan di Indonesia atau WoG (Whole Government). Hal tersebut terlihat pada permasalahan yang sering timbul pada pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia yaitu kurang meratanya distribusi bantuan di tingkat masyarakat desa/kelurahan. Ketepatan sasaran merupakan kunci utama agar program yang telah dilakanakan dapat memberikan dampak yang optimal. Kondisi yang sering terjadi di tingkat bawah / masyarakat yaitu adanya bias pelaksanaan di dalam distribusi bantuan yang disebabkan

adanya diskresi di kalangan petugas. Penggunaan diskresi yang dilakukan oleh para implementator di tingkat bawah (street level bureauacracy) perlu dilakukan pengawasan secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini diperlukan agar ke depan, pemerintah dapat menjamin bahwa distribusi bantuan telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang mengacu pada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana di lapangan. Keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di masyarakat perlu di dukung oleh koordinasi implementator di lapangan dan komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mulai dari level atas sampai dengan level bawah.

DAFTAR PUSTAKA

- BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JAWA TIMUR Farid AGafar Dosen Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Jawa Timur, Di, and Farid AGafar. 2018. "ANALISIS IMPLEMENTASI WHOLE OF GOVERNMENT (WoG) PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI." 5(3): 151–58.
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Prov Jateng. 2019. "Whole of Government." MAMPU All Rights Reserved 9(3): 188–93. <https://www.malaysia.gov.my/portal/category/656>.
- Choiriyah, Choiriyah. 2018. "Implementasi Kebijakan Publik Dalam Penanganan Kemiskinan; Studi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 3(2): 17–30.
- Ferezegia, Dv. 2018. "Analisis Tingkat Kemiskinan." *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 1(1): 1–6. <http://journal.vokasi.ui.ac.id/index.php/jsht/article/download/6/1>.
- Mardiansyah. 2020. "Penerapan Whole of Government (WoG) Dalam Mewujudkan Pelayanan Terintegrasi." *Jurnal Perspektif* 13(1): 1–9.
- Murdiyana, Murdiyana, and Mulyana Mulyana. 2017. "Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 10(1): 73–96.
- Seyedsayamdost, Elham. 2020. "Sustainable Development Goals." *Essential Concepts of Global Environmental Governance* 0042: 251–53.
- Timbuan. 2021. "Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia Dynamics of Government Policy Implementation In." *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Volume 19,.
- Ulum, Tajul et al. 2024. "Jurnal Tajul Ulum." 11: 184–87.